

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**(RENJA - PD)**

**TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033**

**L A R A N T U K A**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

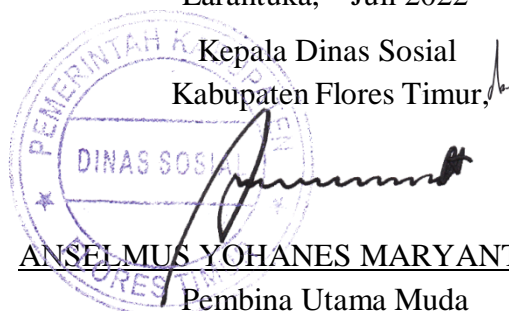
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b Permendagri 86 Tahun 2017 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penetapan tujuan dan sasaran RENJA Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022. RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dijadikan acuan dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) serta sebagai landasan penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2023. Renja ini disusun melalui sebuah proses yang cukup panjang sejak perumusan rancangan awal, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Renja Dinas Sosial demi kemajuan Kabupaten Flores Timur yang kita cintai.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Larantuka, Juli 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Flores Timur,



ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670420 199703 1 008

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERBUP RENSTRA.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-IsuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiPerangkat Daerah.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL .....</b>	<b>45</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	46
3.3 Program dan Kegiatan.....	47
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja perangkat Daerah s/d 2022 .....	6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Flores Timur .....	22
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	40
Tabel 3.1 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....	46
Tabel 4.1 Rencana program kegiatan,sub kegiatan renja Dinas social Tahun 2023 .....	65

## **DAFTAR GAMBAR**

	<b>Hal</b>
<b>Gambar 1.1. Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah .....</b>	<b>2</b>



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR: 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);



11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Sosial Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Sosial Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD

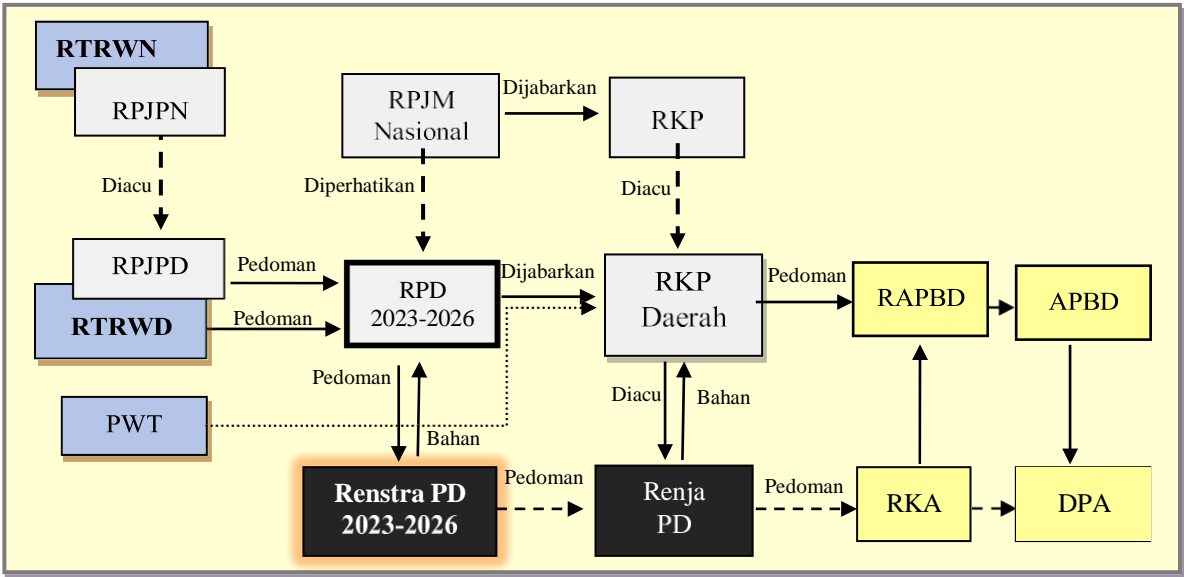


4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk meperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasar kan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



.Berdasarkan bagan pada gambar tersebut maka terlihat sangat jelas hubungan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga memiliki hubungan yang erat dengan dokumen penganggaran karena Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disusun mengacu pada Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeringah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan pedoman pembangunan daerah bidang pelayanan social di Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 baik yang bersumber dari dana APBN, APBD I Provinsi NTT dan APBD II Kabupaten Flores Timur.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pelayanan social.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar Belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2021 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut:



**Tabel II.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022**

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								
						Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	265	150	50	6	60%	8	164	61,8%
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)		42	14	14	100%	14	70	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	60	36	12	12	100%	12	60	100%
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Alat kelistrikan) (jenis)	14	13	12	12	100%	12	13	92,85
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	4	0	0	0	0	0	0	0
						Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	4	2	1	1	100%	1	4	100
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor (jenis)	20	13	18	18	100%	12	18	90
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	180	93	35	35	100%	45	173	96,11
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	230.000	70.000	60.000	60000	100%	65.000	195.000	84,78
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (eks)	1.460	730	365	365	100%	365	1460	100%
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum kantor (orang) (makan, snack)	3775	994	1806	1806	100%	975	3775	100 %
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	530	229	185	125	70%	100	454	85,6%
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)								
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar,Materai dan Perangko)	400 lbr perangko 5.000 dan 500 lbr materai 6.000	499	25	25	100%	150	674	74,8%
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100%	12	60	100%
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenga Teknis Perkantoran yang dibiayai (Orang)	20	20	20	20	100%	20	20	100%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/ operasional (unit)	10	10	10	10	100%	10	10	100%
						Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional (unit)	2 roda dua, 2 mobil MTU, 1 bh mobil Resque, 1 bh mobil Dinas Operasional, 1 mobil Dumlap dan 3 bh speed bood	2 roda dua, 2 mobil MTU, 1 bh mobil Resque, 1 bh mobil Dinas Operasional, 1 mobil Dumlap dan 3 bh speed bood	2 roda dua, 2 mobil MTU, 1 bh mobil Resque, 1 bh mobil Dinas Operasional, 1 mobil Dumlap dan 3 bh speed bood	2 roda dua, 2 mobil MTU, 1 bh mobil Resque, 1 bh mobil Dinas Operasional, 1 mobil Dumlap dan 3 bh speed bood	100%	2 roda dua, 2 mobil MTU, 1 bh mobil Resque, 1 bh mobil Dinas Operasional, 1 mobil Dumlap dan 3 bh speed bood	2 roda dua, 2 mobil MTU, 1 bh mobil Resque, 1 bh mobil Dinas Operasional, 1 mobil Dumlap dan 3 bh speed bood	100%
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	25 bh laptop, 10 computer, 15 bh printer, 4 unit AC	25 bh laptop, 10 computer, 15 bh printer, 4 unit AC	54	54	100%	54	54	100%
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)	100%	81.95%	100%	50,8 %	50,8%	100%	100%	100%
						Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan (%)	97.43%	100%	96.43%	93,53	96,99	97.43%	97,43%	100%
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)									
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KK Warga KAT yang didampingi (KK)	343	44	45	0	0	85	129	37,6

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat)	10	2	2	2	100%	2	8 Rumah Adat : 6 Pemugaran Rumah Adat (2 unit di Ds. Kalike Aimatedan, Solor Selatan, 1 unit di Ds. Balaweling 2 Solor Barat, 3 unit di Ds. Lewoggaran, Solor Selatan) dan 2 Rumah Adat (Lewokluok, Nelelamawangi)	80%
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dunia Usaha dan masyarakat yang berperan dalam upaya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (orang)	400	0	0	0	0	0	0	0
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KATdan PMKS lainnya (%)								
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan (orang)	100	24 KK miskin/72 orang	0	0	0	0	0	0
						Jumlah KMM yang diberdayakan (orang)	1200	20	0	0	0	0	0	0
						Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang diberdayakan (orang)	375	0	0	0	0	0	0	0
						- Jumlah fakir miskin yang diberdayakan (Orang)	543	16431	14108	15.526	110%	14108	12.206	74%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						- Jumlah KUBE yang diberdayakan (KUBE)		70	9	8	90%	5	144	
						Jumlah keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang ditangani (orang)	805	0	0	0	0	0	0	0
						Jumlah KK yang menerima Bantuan stimulan Bedah rumah (KK)	202	7	0	0	0	0	7	3,46
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat yang diberdayakan (orang)								
						- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan (Lembaga)	.....Karang Taruna	19 Org TKSK dan 59 Klpk Karang Taruna (306 orang)	19 Org TKSK dan 53 Klpk KT	19 Org TKSK dan 30 Klpk KT/ 180 Orang	56%	19 Org TKSK dan 53 Klpk KT	19 Org TKSK dan 43 Klpk KT	73%
						Jumlah masyarakat yang meningkat kesadarannya terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa (lembaga)	309	0	0	0	0	0	0	0
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100	28.38	100	70.92	70.92	100	100	100
						Persentase penanganan penyandang disabilitas (%)	51%	21%	27%	27%	96.42%	7%	100	100
						Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina (Orang)	322	0%	322	0	0	322	322	100%
						Persentase eks penyandang penyakit soial yang ditangani (%)	78%	0%	12%	0%	0%	12%	12	15,38%
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)								
						Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)								

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Bantuan Makanan	322	684	125	100	85%	322	25	8%
						Jumlah Panti/Yayasan Sosial yang mendapat Bantuan (Lembaga)	6 panti dan 4 LKS	6	7	6 panti & 3 LKS	100%	7	9 panti : 6 panti anak & 3 panti jompo	90%
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)-> Alat Bantu								
						Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan (orang)	462	451	100	52	52%	100 orang	59 orang	13%
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (orang)	80	0	25	0	0	25	0	0
						Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	720	0	100	0	0	100	0	0
						Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya (orang)	80	0	50	75	100%	200	80	100%
						Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan ketrampilan (orang)	322	0	322	0	0	322	0	0
						Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)	1000	0	40	32	80%	40	40	4 %

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Pelayanan Administrasi Kependudukan								
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) (orang)	200	5	25	5	20%	25	9 ODK (3 org ke Panti Hitbia Kupang, 3 org ke Balai EFATA Kupang, 3 org ke BKW Naibonat Kupang)	5%
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial									
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS / Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana (Klien/orang)	125	65	118	99	84%	25	17	14%
1	06	05			<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)</b>	<b>11%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>6.8%</b>	<b>340%</b>	<b>2%</b>	<b>10.8%</b>	<b>11%</b>
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)								
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	200	7	30	3	10%	30	8 org : 3 orang ke Panti Tunas Harapan Lembata, 5 org ke Balai Karya Wanita Naibonat Kupang)	4%
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dokumen)	250	250	250	250	100%	250	250	100%
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH (kali)	15452	11.639	14.108	12.823	91%	2	11.947	77%
1	06	06			<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)</b>	<b>100%</b>	<b>28.38%</b>	<b>100%</b>	<b>70.92%</b>	<b>70.92%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)								
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Makanan	10000	25 ton beras/18005 orang	2000	108,2 Ton Beras (100 Ton Beras CBP = 11.905 orang, 7 Ton Beras Bantuan Provinsi NTT = 833 orang, 1,2 Ton Beras cadangan pemerintah di gudang dinas sosial = 143 orang makan selama 21 masa tanggap darurat) TOTAL 12.881 orang/jiwa. 1 Ton Beras Bansos (pengadaan 2021)	100%	2000	40	4%
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Sandang								
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Tempat Penampungan pengungsi								



Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Penanggulangan Khusus								
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Dukungan Psikologis								
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota									
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah bangunan fisik untuk Keresasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik / perbatasan yang dibangun (unit)	24	4 unit dan 2 kasus	4	0	0%	10	12	50%
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi (lembaga)	41	41	41	41	100%	41	41	100%
1	06	07			<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>									
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota									
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)	5	1	1	1	100%	1	1	100%

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah pada program rehabilitasi sosial pada indikator :
  - Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina,
  - Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani, dan
  - Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah pada program pemberdayaan sosial pada indikator :
  - Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
  - Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah pada program perlindungan dan jaminan sosial pada indikator :
  - Persentase anak terlantar yang ditangani
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :
  - Sumber daya manusia
  - Ketersediaan anggaran
  - Koordinasi internal dan eksternal
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah adanya pandemi covid 19 sehingga realisasi yang dicapai melebihi dari target yang direncanakan dimana berbagai bantuan pada bidang social diutamakan pada masa tersebut.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :
  - Support data yang valid dan terupdate agar bantuan sosial yang tersalurkan tepat sasaran dan benar-benar pemanfaatan untuk fakir miskin

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Capaian SPM/Standar Nasional dan IKK sebagaimana pada table berikut ini.

Tabel II.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM /	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√	6.70%	6.77%	10.42%	9.38%	11,58%		10.42%	9.38%	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama tahun 2021 sebanyak 3939 orang, lebih besar dari target yang ditentukan yaitu 2303 orang. Bantuan sosial ini merupakan dampak dari pandemi covid 19
2	Persentase PMKS yang tertangani		√	6.70%	6.77%	10.71%	10.58%	10,84%		10.71%	10.58%	PMKS yang banyak tertangani adalah fakir miskin melalui program PKH dan BPNT
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	√		65.55	65.65	0	0	37		0	0	Pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial adalah penyaluran bantuan pangan non tunai sedangkan untuk sandang dan papan tidak ada

No	Indikator	SPM /	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	√		85.45	85.55	0	0	60		0	0	Jumlah 6 panti anak (3 PAA & 3 PAC) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan sembako
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	√		50	55	0	0	60		0	0	Jumlah 6 panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial yaitu 3 PAA & 3 PAC
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	√		0.4	0.5	0	0	0		0	0	Tidak ada wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	√		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Total korban bencana alam dan bencana sosial tahun 2021 sebanyak 549 orang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	√		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Total korban bencana alam dan bencana sosial tahun 2021 sebanyak 549 orang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap oleh TIM TAGANA

No	Indikator	SPM /	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	√		5.24	5.24	100	100	70		100	100	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di tahun 2021 sebanyak 3520 dari total 5402 orang. Bantuan jaminan sosial ini berdampak pandemi covid - 19
Indikator berdasarkan RPD 2023-2026												
1	Persentase PMKS (%)		√			10.42%	9.38%			10.42%	9.38%	
2	Persentase Tingkat kemiskinan (%)		√			10%	9.85%			10%	9.85%	
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)												
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√				100	100			100	100	
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√				100	100			100	100	
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	√				100	100			100	100	
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√				100	100			100	100	

No	Indikator	SPM /	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	√				100	100			100	100	
Indikator Kinerja Kunci												
1	Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)		√			100	100			100	100	
2	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		√			100	100			100	100	

Berdasarkan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Belum memenuhi target sehingga program dan kegiatan pada tahun 2023 diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Program penanganan bencana berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja menunjukan kinerja pelayanan yang baik. Hal ini berarti seluruh korban bencana baik bencana alam maupun bencana social telah ditangani dengan baik selama masa tanggap darurat. Meski demikian terkait dengan kualitas manajemen pelayanan korban bencana perlu menjadi perhatian bersama pada masa mendatang dan ketersediaan sarana prasarana penunjang dalam pelayanan kepada seluruh korban yang ada.

### 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Sosial diatas menunjukkan beberapa indikator telah mencapai target dan beberapa indikator lainnya belum mencapai target. Adapun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten menjadi faktor yang mendukung kinerja. Kabupaten Flores Timur memiliki ketersediaan sumber daya yang berkompeten belum mencukupi sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja.

b) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai standar menjadi faktor pendukung kinerja. Di Kabupaten Flores Timur ketersediaan sarana dan prasarana belum lengkap dan sesuai standar sehingga menjadi factor penghambat pencapaian kinerja.

c) Kerjasama Lintas Sektor

Pencapaian kinerja Dinas Sosial membutuhkan peran serta lintas sektor. Dinas Sosial tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Peningkatan pelayanan sosial bagi PMKS
5. Tingginya beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2023 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Sosial dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPD tahun 2023-2026. Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan relatif sama dengan tahun sebelumnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara umum program kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2023 sudah sesuai dengan analisis kebutuhan Dinas Sosial. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.3

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2023 serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam RKPD Kabupaten Flores Timur terdapat 1 (satu) program rutin dan 6 (Enam) Program yang menjadi tanggung jawab sesuai tupoksi Dinas Sosial, yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Pemberdayaan Sosial;
- 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
- 4. Program Rehabilitasi Sosial;
- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 6. Program Penanganan Bencana;
- 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dengan tetap mengacu pada visi, tujuan, dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur maka pada tahun 2023 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dimana didalamnya terdapat 7 (tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 secara umum dapat digambarkan dalam tabel II.3



Tabel II.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS SOSIAL				5,255,549,589	DINAS SOSIAL				5,255,549,589	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,184,549,589	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,184,549,589	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	OPD/Larantuka	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,184,549,589	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	OPD/Larantuka	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,184,549,589	
		OPD/Larantuka	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			OPD/Larantuka	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
		OPD/Larantuka	Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	38.46			OPD/Larantuka	Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	38.46		
		OPD/Larantuka	Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100			OPD/Larantuka	Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100	100,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100	100,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 Dokumen	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3 Laporan	45,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3 Laporan	45,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)</b>	<b>3</b>	<b>1,985,249,589</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)</b>	<b>3</b>	<b>1,985,249,589</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD/Larantuka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	26 Orang (12 bulan)	1,920,249,589	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD/Larantuka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	26 Orang (12 bulan)	1,920,249,589	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	1 Dokumen	45,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	1 Dokumen	45,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	2 laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	2 laporan	20,000,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>30,000,000</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	30,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10 orang	130,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10 orang	130,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	10,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	10,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	10,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	70,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OPD/Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	70,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	OPD/Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	40,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	OPD/Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	40,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	201,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	OPD/Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	201,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket ATK (termasuk bahan perlengkapan komputer)	28,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket ATK (termasuk bahan perlengkapan komputer)	28,500,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (bahan kebersihan kantor dan perlengkapan dapur rumah jabatan)	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket alat kebersihan	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (bahan kebersihan kantor dan perlengkapan dapur rumah jabatan)	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket alat kebersihan	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM, Beras)	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Kendaraan	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM, Beras)	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Kendaraan	50,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket (Jilid Buku & Fotocopy)	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD/Larantuka	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket (Jilid Buku & Fotocopy)	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD/Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	35,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	35,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	60,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</b>	<b>100</b>	<b>325,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</b>	<b>100</b>	<b>325,000,000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD/Larantuka	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit sepeda motor	35,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD/Larantuka	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit sepeda motor	35,000,000	
	Pengadaan Mebeleur	OPD/Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	1 unit Lemari Arsip, 5 unit meja kerja, 5 unit kursi kerja, 2 kursi tunggu stanleis	125,000,000	Pengadaan Mebeleur	OPD/Larantuka	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	1 unit Lemari Arsip, 5 unit meja kerja, 5 unit kursi kerja, 2 kursi tunggu stanleis	125,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit AC untuk ruang puskesmas	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit AC untuk ruang puskesmas	10,000,000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan	1 unit website Dinas Sosial	15,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan	1 unit website Dinas Sosial	15,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit gedung PUSKESOS	75,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit gedung PUSKESOS	75,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit (2 laptop, 1 PC, dan 1 printer)	45,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit (2 laptop, 1 PC, dan 1 printer)	45,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	parkiran puskesmas	20,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	parkiran puskesmas	20,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</b>	<b>100</b>	<b>287,800,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</b>	<b>100</b>	<b>287,800,000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	65,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	220,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD/Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	220,800,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Presentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>125,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>OPD/Larantuka</b>	<b>Presentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>125,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD/Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Kendaraan	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD/Larantuka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Kendaraan	50,000,000	
	Pemeliharaan aset tidak berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 aset website Dinas Sosial	15,000,000	Pemeliharaan aset tidak berwujud	OPD/Larantuka	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 aset website Dinas Sosial	15,000,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	30,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	30,000,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	30,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD/Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	30,000,000	
	Urusan Pemerintahan Dibidang Sosial				2,071,000,000	Urusan Pemerintahan Dibidang Sosial				2,071,000,000	
	Program Pemberdayaan Sosial				475,000,000	Program Pemberdayaan Sosial				475,000,000	
			Presentase Pemberdayaan KAT	0.36	125,000,000			Presentase Pemberdayaan KAT	0.36	125,000,000	
			Pesentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	0.13	350,000,000			Pesentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	0.13	350,000,000	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			0.37	125,000,000	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			0.37	125,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kec. Solor Timur (Desa Tanah Werang), (Desa lewotamah ole & desa lamaole) kec. solor barat, (desa gekeng deran & desa lamanabi) kec. tanjung bunga, (desa riang padu) kec. adonara barat.	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	44 keluarga	75,000,000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kec. Solor Timur (Desa Tanah Werang), (Desa lewotamah ole & desa lamaole) kec. solor barat, (desa gekeng deran & desa lamanabi) kec. tanjung bunga, (desa riang padu) kec. adonara barat.	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	44 keluarga	75,000,000	
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kec. Solor Timur (Desa Tanah Werang), (Desa aransina, desa lamatutu, desa laton liwo II) Kec. Tanjung Bunga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	44 keluarga	50,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kec. Solor Timur (Desa Tanah Werang), (Desa aransina, desa lamatutu, desa laton liwo II) Kec. Tanjung Bunga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	44 keluarga	50,000,000	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0.13</b>	<b>350,000,000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0.13</b>	<b>350,000,000</b>	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 kecamatan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	75,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 kecamatan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	75,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 kecamatan	Jumlah tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 TKSK	75,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 kecamatan	Jumlah tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 TKSK	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber kesejahteraan sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Larantuka (Kel. Sarotari Tengah, Kel. Pukentobi Wangin Bao), Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Ked. Wulanggitang (Desa Boru)	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50 Keluarga	75,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber kesejahteraan sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Larantuka (Kel. Sarotari Tengah, Kel. Pukentobi Wangin Bao), Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Ked. Wulanggitang (Desa Boru)	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50 Keluarga	75,000,000	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kec. Kelubagolit (Desa Sukutokan), Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Larantuka, Adonara barat, Ile mandiri, Solor barat, Solo (jawa tengah)	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas kewenangannya kabupaten/kota	1 Lembaga	75,000,000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kec. Kelubagolit (Desa Sukutokan), Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Larantuka, Adonara barat, Ile mandiri, Solor barat, Solo (jawa tengah)	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas kewenangannya kabupaten/kota	1 Lembaga	75,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Sertifikat	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Sertifikat	50,000,000	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan		Presentase kasus yang ditangani (%)	100	75,000,000	Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan		Presentase kasus yang ditangani (%)	100	75,000,000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah provinsi untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	75,000,000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah provinsi untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	75,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asal					Asal					
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	75,000,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	75,000,000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Presentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	53.06	556,000,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Presentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	53.06	556,000,000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Larantuka		0.1	305,000,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Larantuka		0.1	305,000,000	
	Penyediaan Permakanan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50,000,000	Penyediaan Permakanan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	50,000,000	
	Penyediaan Sandang	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	Penyediaan Sandang	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Alat Bantu	Kec. Adonara (Desa Kolimasang), Kec. Adonara Barat (Desa Danibao), Kec. Adonara Timur (Desa Tapobali, Desa Saosina, Desa Lamahala Jaya), Kec. Demon Pagong (Desa Blepanawa), Kec. Ilebolog (Desa Nelelamadike, Desa Nelelamawangi II), Kec. Ile Bura (Desa Lewotobi), Kec. Lantuka (Kel. Lewolere, Kel. Balela, Kel. Amagarapati), Kec. Solor Barat (Desa Balaweling I, Desa Ritaebang), Kec. Solor Selatan (Desa Sulengwaseng), Kec. Solor Timur (Desa Motonwutun, Desa Menanga), Kec. Tanjung Bunga (Desa Ratulodong), Kec. Titehena (Desa Watowara, Desa Konga, Desa Lewoingu, Desa Leraboleng), Kec. Wotan Ulumando (Desa Oyangbarang), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Desa Nileknoheng, Desa Klatanlo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Kec. Adonara (Desa Kolimasang), Kec. Adonara Barat (Desa Danibao), Kec. Adonara Timur (Desa Tapobali, Desa Saosina, Desa Lamahala Jaya), Kec. Demon Pagong (Desa Blepanawa), Kec. Ilebolog (Desa Nelelamadike, Desa Nelelamawangi II), Kec. Ile Bura (Desa Lewotobi), Kec. Lantuka (Kel. Lewolere, Kel. Balela, Kel. Amagarapati), Kec. Solor Barat (Desa Balaweling I, Desa Ritaebang), Kec. Solor Selatan (Desa Sulengwaseng), Kec. Solor Timur (Desa Motonwutun, Desa Menanga), Kec. Tanjung Bunga (Desa Ratulodong), Kec. Titehena (Desa Watowara, Desa Konga, Desa Lewoingu, Desa Leraboleng), Kec. Wotan Ulumando (Desa Oyangbarang), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Desa Nileknoheng, Desa Klatanlo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Desa Horowura), Kec. Adonara Timur (Desa Terong), Kec. Ile Mandiri (Desa Wailolong), Kec. Larantuka (Kel. Postoh, Kel. Weri, Kel. Pohon Sirih, Kel. Ekasapta), Kec. Lewolema (Desa Bantala, Desa Riangkotek), Kec. Solor Timur (Desa Menanga), Kec. Tanjung Bunga (Desa Sinarhadigala, Desa Ratulodong), Kec. Titehena (Desa Watowara, Desa Konga, Desa Lewoingu, Desa Leraboleng), Kec. Wotan Ulumando (Desa Oyangbarang), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Desa Nileknoheng, Desa Klatanlo)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Desa Horowura), Kec. Adonara Timur (Desa Terong), Kec. Ile Mandiri (Desa Wailolong), Kec. Larantuka (Kel. Postoh, Kel. Weri, Kel. Pohon Sirih, Kel. Ekasapta), Kec. Lewolema (Desa Bantala, Desa Riangkotek), Kec. Solor Timur (Desa Menanga), Kec. Tanjung Bunga (Desa Sinarhadigala, Desa Ratulodong), Kec. Titehena (Desa Watowara, Desa Konga, Desa Lewoingu, Desa Leraboleng), Kec. Wotan Ulumando (Desa Oyangbarang), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Desa Nileknoheng, Desa Klatanlo)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	25 Orang	50,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	25 Orang	50,000,000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	25,000,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	25,000,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kec. Ile Bura (Desa Lewotobi), Kec. Witihamas (Desa Peldo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kec. Ile Bura (Desa Lewotobi), Kec. Witihamas (Desa Peldo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Larantuka		0.213270142	251,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Larantuka		0.213270142	251,000,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	25,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	25,000,000	
	Penyediaan permakanan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50,000,000	Penyediaan permakanan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50,000,000	
	Penyediaan Sandang	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	30,000,000	Penyediaan Sandang	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	30,000,000	
	Penyediaan Alat Bantu	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50,000,000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	21,000,000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	21,000,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	25,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	25,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	25,000,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	25,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	25,000,000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Presentase anak terlantar yang ditangani</b>	<b>13.36</b>	<b>580,000,000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Presentase anak terlantar yang ditangani</b>	<b>13.36</b>	<b>580,000,000</b>	
			<b>Presentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan</b>	<b>100</b>				<b>Presentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan</b>	<b>100</b>		
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Larantuka</b>		<b>13.36</b>	<b>180,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Larantuka</b>		<b>13.36</b>	<b>180,000,000</b>	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Anak	60,000,000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Anak	60,000,000	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Anak	60,000,000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Anak	60,000,000	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Anak	60,000,000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Anak	60,000,000	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Larantuka</b>		<b>100</b>	<b>400,000,000</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Larantuka</b>		<b>100</b>	<b>400,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	129,904 Orang (DTKS	100,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	129,904 Orang (DTKS	100,000,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	12,823 (Keluarga program sembako)	100,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	12,823 (Keluarga program sembako)	100,000,000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	129,904 Orang (DTKS	200,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	129,904 Orang (DTKS	200,000,000	
	<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>Presentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana</b>	<b>100</b>	<b>360,000,000</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>Presentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana</b>	<b>100</b>	<b>360,000,000</b>	
			<b>Presentase desa/kelurahan siaga bencana</b>	<b>1.2</b>				<b>Presentase desa/kelurahan siaga bencana</b>	<b>1.2</b>		
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>270,000,000</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>270,000,000</b>	
	Penyediaan Makanan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota	50 orang	75,000,000	Penyediaan Makanan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota	50 orang	75,000,000	
	Penyediaan Sandang	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50,000,000	Penyediaan Sandang	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 tempat sesuai kejadian	50,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 tempat sesuai kejadian	50,000,000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota	25 Orang	50,000,000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota	25 Orang	50,000,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten /Kota	25 Orang	45,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersebar di 250 desa Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten /Kota	25 Orang	45,000,000	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota</b>	<b>Larantuka</b>		<b>100</b>	<b>90,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota</b>	<b>Larantuka</b>		<b>100</b>	<b>90,000,000</b>	
	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kec. Solor Timur (Desa Menanga), Ds.Duablolong,Ds Pledo, Ds. Oyangbarang,Ds keloka, Ds lamatutu, Ds.Adabang, Ds.sinarbading, Ds.lewobele, Ds.Nerabelen	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	50,000,000	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kec. Solor Timur (Desa Menanga), Ds.Duablolong,Ds Pledo, Ds. Oyangbarang,Ds keloka, Ds lamatutu, Ds.Adabang, Ds.sinarbading, Ds.lewobele, Ds.Nerabelen	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	50,000,000	
	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kec Larantuka (Kel. Ekasapta)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	41 Orang	40,000,000	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kec Larantuka (Kel. Ekasapta)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	41 Orang	40,000,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Larantuka</b>	<b>Cakupan Taman Makam pahlawan yang dikelola</b>	<b>100</b>	<b>25,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Larantuka</b>	<b>Cakupan Taman Makam pahlawan yang dikelola</b>	<b>100</b>	<b>25,000,000</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Larantuka		100	25,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Larantuka		100	25,000,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP. Lapak Tana - Larantuka	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam TMP	25,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP. Lapak Tana - Larantuka	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam TMP	25,000,000	

**2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2022. Usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan pada 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat pada wilayahnya masing-masing yang sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Usulan masyarakat sebagian besar pada program dan kegiatan penyediaan alat bantu, dan pendataan fakir miskin serta Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.4 berikut ini:

---

**Tabel II.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur**

N o	Program/Kegiata n	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Ds. Lewotanah Ole & Ds Lamaole Kec Solor Barat, Ds. Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga, Ds. Lamanabi Kec Tanjung Bunga, Ds.Riang Padu Kec Adonara Barat.	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Masuk dalam lokasi penetapan daerah KAT
		> Desa Tanahwerang Kec Solor Timur.			
		Desa Tiwatobi, Desa Muda Keputu,Desa Halakodanuan, Desa Watotutu,Desa Painapang,Desa Lewohala Kec. Ile Mandiri, Desa Ratulodong Kec. Tanjung Bunga			
2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Ds. Aransina Ds. Lamatutu , Ds. Laton Liwo II Kec Tanjung Bunga	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Desa di Kecamatan Ile Boleng, Seluruh Kelurahan di Kecamatan Larantuka, Desa Balaweling Notan, Desa Sandosi, Desa Lewopulo Kec. Witihama, Desa Lewoloba dan Lewohala Kec. Ile Mandiri, Desa Bantala Riangkotek, Painapang, Balukherin, IlePadu Kec. Lewolema, Desa Sinar Hading Kec.Tanjung Bunga, Kecamatan Ile Mandiri,Kelurahan Sarotari, Kec. Ile Bura, Kec. Demon Pagong, Kec. Titehena, Kec.Wulanggitang, Desa Blepanawa Kec. Demong Pagong, Desa Lewohala, Riangkemie kec. Ile mandiri,Desa Tiwatobi, Desa Halakodanuan, Desa Watotutu Kec. Ile Mandiri,	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Harus terdata di dalam DTKS
		Desa Kolaka,Desa Lewobunga, Desa Gekengderan, Desa Patisirawalang, Desa Latonliwo , Desa Ratulodong, Desa Sinarhadigala, Desa Waibao, Desa Bandona,Desa Bahinga,Desa Aransina Kec. Tanjung Bunga, Desa Sinar Hading,Desa Ilepadung Kec.Lewolema.Des a Tuagoetobi, Desa Weranggere, Desa Oringbele, Desa Balawelin Kec. Witihama.Seluruh			

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Kesehatan Witiama.Des Tuawolo Kec. Adonara Timur, Desa Lewoingu Kec.Titehena, Desa Kobasoma, Desa Pululera, Desa Hokeng Jaya, Desa Boru Kec. Wulanggitang.Seluruh Kecamatan di Solor Barat,Solor Timur dan Solor Selatan.			
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Larantuka, Adonara Barat, Ile Mandiri, Solor Barat, Solo (Jawa Tengah)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Peralatan Musik Organ Tunggal 1 Unit dan Alat Cetak Batu Batako 2 Unit dan Paving Block 10 Unit	Pemohon melalui Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan (proposal) ke Dinas Sosial
		> Desa Daniwato Kec. Solor Barat, Desa Menanga Solor Timur, Desa Lelenbala Adonara Timur, Desa Boru Wulanggitang, Desa Suku Tokan Kelubagolit, Desa Bilal Adonara Timur.			
		Semua Desa Kecamatan Kelubagolit, Desa Kuagoetobi, Horinara, Muda, Mangaaleng, Lambunga,Desa Lewobunga Kec. Adonara Timur, Desa Lamawolo Kec. Ile Boleng, Desa Kawalelo, Lamika,Lewomuda,Lewokluok Kec. Demong Pagong, Desa Watobuku Solor Timur, Desa Lamatutu Kec. Tanjung Bunga, Desa Riangkemie Kec. Ile Mandiri.			
5	Penyediaan Permakanan	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemohon melalui Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan (proposal) ke Dinas Sosial
		> Desa Watowara Kec. Titehena			
6	Penyediaan Alat Bantu	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas dan lansia 710 Orang	Pemohon melalui Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan (proposal) ke Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		>Desa Riangkotek Kec. Lewolema, Desa Wailolong kec.Ile Mandiri, Desa Wewit Kec.Adonarah Tengah, Desa Watowara, Desa Leraboleng Kec. Titehena, Desa Konga,Desa Lewoingu, Desa Tapobali, Desa Terong, Desa Saosina,Desa Lamahalajaya Kec. Adonara Timur, Desa Balaweling 1, Desa Ritaebang Kec.Solor Barat, Desa Oyangbaran Kec. Wotan Ulumado, Desa Pledo Kec. Witihama, Desa Kolimasan Kec. Adonara, Pohon sirih Kel. Pohon sirih, Desa Nelelamadike, Desa Nelelamawangi 2, Desa Duabelolong Kec. Ile Boleng, Desa Sulengwaseng Kec. Solor Selatan, Balela Kel. Balela, Desa Horowura Kec. Adonarah Tengah, Desa Ratulodong Kec. Tanjung Bunga, Ekasapta Kel. Ekasapta, Desa Boru kec. Wulanggitang, Amagarapati Kel.Amagarapati, Desa Danibao Kec. Adonara Barat, Desa BIlrawan Kec. Ile Bura, Desa Bantala Kec. Lewolema.			
7	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Penambahan kuota Program PKH, PBNT, KIS, dan KIP 10.000 KK	Harus terdata di dalam DTKS
		Desa Birawan, Desa Riangbura,Desa Lewoawang, Desa Nobo Konga Kec. Ile Bura, Desa Demondei, Desa Pandai, Desa Oyangbaran Kec. Wotan ulumado, Desa Lewopao, Desa Nubalema, Desa Oe Sayang, Desa Wewit Kec. Adoteng, Desa Balukherin Kec. Lewolema, Desa Daniwato Kec. Solor Barat, Desa Tenawahang, Desa Dulijaya Kec. Titehena, Desa Dawataa, Desa Puhu, Desa Lelenbala, Desa Tapobali, Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur, Lewolere Kec. Larantuka, DEsa Waiula, Desa Nawakote, Desa Pantai Oa, Desa Hokeng Jaya, Desa Waiula, Desa Nileknohing, Desa Hewa, Desa Boru, Desa Boru Kedang Kec. Wulanggitang,			

No	Program/Kegiatan	Lokasi (Kecamatan/Desa)	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Desa Riawale, Desa Nelebelolong, Desa Nelelamawangi 2 Kec. Ile Boleng, Desa Oyangbaran Kec. Wotan Ulumado, Desa Bandona, Desa Lamanabi, Desa Dusanipa, Desa Latonliwo 2 Kec. Tanjung Bunga, Desa Menang Kec. Solor Timur, Desa Bantala Kec. Lewolema, Desa Lewoggaran, Desa Sulengwaseng, Desa Kenere, Desa Kalike Aimatean Kec. Solor Selatan, Desa Blepanawa Kec. Demon Pagong, Desa Riangkemie Kec. Ile Mandiri, Kelurahan Balela Larantuka.			
8	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Ds Duablolong, Ds Pledo, Ds. Oyangbarang, Ds Kolaka, Ds Lamatutu, Ds. Ilepung, Ds. Adabang, Ds. Sinarhading, Ds. Lewobe, Ds. Nurabelen	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemohon melalui Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan (proposal) ke Dinas Sosial
		>Desa Menangga Ke. Solor Timur.			
9	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota		Pemohon melalui Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan (proposal) ke Dinas Sosial
		> Ekasapta Larantuka			
10	Penyediaan Makanan	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota		
		> Waiwerang Kota Adonara Timur			

Berdasarkan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 diatas, semua usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah dirangkum dari hasil musyawarah rencana pembangunan di kecamatan tahun 2022. Ada usulan yang diterima dan ada usulan yang ditolak. Usulan diterima maupun ditolak dengan catatan sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan sosial KAT, wilayah yang mengusulkan harus masuk dalam lokasi penetapan daerah KAT yang ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial.
2. Untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, data usulan yang masuk harus terdata di dalam DTKS
3. Untuk kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Alat Bantu, Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, Pemohon melalui Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan surat permohonan (proposal) ke Dinas Sosial

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :
  - (a) Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
  - (b) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - (c) Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - (d) Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 untuk mendukung visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kualitas hidup PMKS yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2023-2026. Dari tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, maka dapat ditentukan sasaran strategi, indikator sasaran, serta target capaian Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, yaitu sesuai table berikut:

Tabel III.1  
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian
			Tahun 2023
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Persentase PMKS	10,42%
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	10,71%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan renja awal dalam periode Renstra 2023-2026. Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama satu tahun ke depan merupakan penerjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang pelayanan sosial yang didasarkan pada arah kebijakan dan permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan dalam bidang social terlihat dalam dokumen RKPD tahun 2023 yakni pada prioritas SDM, Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Stunting, dengan sasaran meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial. Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel III.2

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1-6	0-0	0-0	01		DINAS SOSIAL		OPD/Larantuka		5,255,549,589				4,117,199,589
x	xx				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		OPD/Larantuka		3,184,549,589				2,817,199,589
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				2,071,000,000				1,300,000,000
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT		36	475,000,000			-	180,000,000
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial		13				26	
1	06	02	2		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			37	125,000,000				-
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Ds. Lewotinah Ole& Ds Lamaole Kec Solor Barat, Ds. Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga, Ds.	44	75,000,000	APBD II (DAU)			

KODE									RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	LOKASI	TARGET		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
									Lamanabi Kec Tanjung Bunga, Ds.Riang Padu Kec Adonara Barat.						
1	06	02	2.01	02			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec Tanjung Bunga (Desa Aransina, Lamatutu, Laton Liwo II), Solor Timur (Desa Tanahwerang)	44	50,000,000	APBD II (DAU)			
1	06	02	2				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Larantuka	13	350,000,000			25.97	180,000,000
1	06	02	2.03	01			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	50	75,000,000	APBD II (DAU)		50	50,000,000
1	06	02	2.03	02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	19 TKSK	75,000,000	APBD II (DAU)		19 TKSK	50,000,000

1	06	02	2.03	03			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa), Kecamatan Larantuka (18 Desa/Kel), Kec Witihama (Desa Balaweling Notan, Sandosi, Lewopulo, Tuagoetobi, Weranggere, Oringbele, Balawelin), Kec Ile Mandiri (Desa Lewoloba, Tiwatobi, Halakodanuan, Watotutu, Lewohala), Kec Lewolema (Desa Bantala Riangkotek, Painapang, Balukherin, Ile Padung, Sinar Hading), Kec.Tanjung Bunga (Desa Kolaka, Lewobunga, Gekengderan, Patisirawalang, Latonliwo, Ratulodong, Sinar Hadigala, Waibao, Bandona, Bahinga, Desa Aransina),	50	75,000,000	APBD II (DAU)		50	50,000,000
---	----	----	------	----	--	--	--	---	--	----	------------	------------------	--	----	------------

									Kec. Ile Bura (7 Desa), Kec. Demong Pagong (Desa Blepanawa), Kec. Adonara Timur (Desa Tuawolo), Kec.Titehena (Desa Lewoingu, Kobasoma), Kec. Wulanggitang (Desa Pululera, Hokeng Jaya, Boru), Kec. Solor Barat, Solor Timur, dan Solor Selatan.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KODE								INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)		SUMBER DANA	TARGET
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
1	06	02	2.03	04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Solo (Jawa Tengah), Larantuka, Adonara Barat, Kec Kelubagolit (12 Desa), Kec Witihama (Desa Tuwagoetobi), Kec Adonara Timur (Desa Lewo Bunga, Lelenbala, Bilal), Kec. Ile Boleng (Desa Lamawolo) Kec Demon Pagong (Desa Kawalelo, Lamika, Lewomuda, Lewokluok) Kec Ile Mandiri (Desa Riang Kemie, Tiwatobi, Muda Keputu, Watotutu, Halakodanuan, Lewohala), Kec Lewolema (Desa Painapang), Kec Tj Bunga (Desa Ratu Lodong,	2	75,000,000	APBD II (DAU)		1	30,000,000

KODE								RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	LOKASI	TARGET		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	TARGET
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
								Lamatutu), Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Solor Timur (Desa Menanga, Watobuku), Wulanggitang (Desa Boru).							



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
1	06	02	2.03	05			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SumberDaya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	6	50,000,000	APBD II (DAU)			
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial			Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	Larantuka	53.06	556,000,000			60.06	550,000,000
1	06	04	2			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Larantuka	10%	305,000,000			10.95	294,000,000
1	06	04	2.01	01			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	25	50,000,000	APBD II (DAU)		25	50,000,000
1	06	04	2.01	02			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	25	25,000,000	APBD II (DAU)		25	25,000,000
1	06	04	2.01	03			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang	Kec Titehena (Desa)	15	50,000,000	APBD II		15	50,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
								Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Watowara, Leraboleng, Konga, Lewoingu), Kec Ile Bura (Desa Birawan), Kec Larantuka (Kel. Balela, Ekasapta, Amagarapati, Pohon Sirih), Kec Ile Mandiri (Desa Wailolong), Kec. Lewolema (Desa Riangkotek, Bantala), Kec.Adonara Tengah (Desa Wewit, Horowura), Kec. Adonara Timur (Tapobali, Terong, Saosina, Lamahala Jaya), Kec.Solor Barat (Desa Balaweling 1, Ritaebang), Kec. Adonara Barat (Desa Danibao), Kec.			(DAU)			

KODE								INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)		SUMBER DANA	TARGET
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
									Adonara (Desa Kolimasan), Kec. Wotan Ulumado (Desa Oyangbaran), Kec. Witihamas (Pledo), Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadike, Duablolong, Nelelamawangi 2), Kec. Solor Selatan (Desa Sulengwaseng), Kec. Tanjung Bunga (Desa Ratulodong), Kec. Wulanggitang (Desa Boru)						
1	06	04	2.01	05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	25	25,000,000	APBD II (DAU)		25	24,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
1	06	04	2.01	06			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	25	50,000,000	APBD II (DAU)		25	40,000,000
1	06	04	2.01	07			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	20	25,000,000	APBD II (DAU)		20	25,000,000
1	06	04	2.01	08			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	20,000,000	APBD II (DAU)		5	20,000,000
1	06	04	2.01	09			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	20,000,000	APBD II (DAU)		5	20,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
1	06	04	2.01	10			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	20,000,000	APBD II (DAU)		5	20,000,000
1	06	04	2.01	12			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	20,000,000	APBD II (DAU)		5	20,000,000
1	06	04	2				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Larantuka	21	251,000,000			27.11	256,000,000
1	06	04	2.02	02			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	10	25,000,000	APBD II (DAU)		10	30,000,000
1	06	04	2.02	03			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	10	50,000,000	APBD II (DAU)		10	50,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
1	06	04	2.02	04			Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	10	30,000,000	APBD II (DAU)		10	30,000,000
1	06	04	2.02	05			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	10	50,000,000	APBD II (DAU)		10	50,000,000
1	06	04	2.02	06			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	10	21,000,000	APBD II (DAU)		10	21,000,000
1	06	04	2.02	07			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	10	25,000,000	APBD II (DAU)		10	25,000,000
1	06	04	2.02	08			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	10	25,000,000	APBD II (DAU)		10	25,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
1	06	04	2.02	10			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	25,000,000	APBD II (DAU)		5	25,000,000
1	06	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			Persentase anak terlantar yang ditangani (%)		13.36	580,000,000			16.33	240,000,000
								Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan(%)		100				100	
1	06	05	2		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				Larantuka	13.36	180,000,000			16.33	90,000,000
1	06	05	2.01	01			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	60,000,000	APBD II (DAU)		4	30,000,000
1	06	05	2.01	02			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	60,000,000	APBD II (DAU)		4	30,000,000
1	06	05	2.01	03			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	5	60,000,000	APBD II (DAU)		4	30,000,000
1	06	05	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota				Larantuka	100	400,000,000			100	150,000,000

1	06	05	2.02	01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>	Kec. Ile Bura (Desa Birawan, Riangbura, Lewoawang, Nobo Konga), Kec. Wotan Ulumado (Desa Demondei, Pandai, Oyangbaran), Kec. Adonara Tengah (Desa Lewopao, Nubalema, Oe Sayang, Desa Wewit), Kec. Lewolema (Desa Balukherin, Bantala), Kec Ile Boleng (Desa Riawale, Nelebelolong, Nelelamawangi 2), Kec Tj Bunga (Desa Bandona, Lamanabi, Nusanipa, Latonliwo 2), Kec. Solor Timur (Desa Menanga), Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Kec Titehena (Desa Tenawahang, Dulijaya), Kec. Ado Timur (Desa Dawataa, Puhu, Lelenbala, Tapobali, Lamahala Jaya) Kec. Larantuka (Lewolere, Balela)	129,904	100,000,000	APBD II (DAU)		129,904	50,000,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	---	---------	-------------	------------------	--	---------	------------



									Kec. Wulanggitang (Desa Waiula, Nawakote, Pantai Oa, Hokeng Jaya, Nileknohing, Hewa, Boru, Boru Kedang), Kec. Solor Selatan (Desa Lewoggaran, Kenere, Sulengwaseng, Kalike Aimatean), Kec. Demon Pagong (Desa Blepanawa), Kec. Ile Mandiri (Desa Riangkemie)						
1	06	05	2.02	02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota</i>	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	12.823	100,000,000	APBD II (DAU)		12.823 (Program Sembako)	50,000,000
1	06	05	2.02	03			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	32.476	200,000,000	APBD II (DAU)		129,904	50,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2			3	6	4	5	7	8	9	10
1	06	06	2.02	01			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Ds Duablolong, Ds Pledo, Ds. Oyangbarang, Ds Kolaka, Ds Lamatutu, Ds. Ilepadung, Ds. Adabang, Ds. Sinarhading, Ds. Lewobele, Ds. Nurabelen, Ds. Waitukan, Ds. Kalike Aimatean, Desa Menanga.	3	50,000,000	APBD II (DAU)		3	40,000,000
1	06	06	2.02	02			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	41	40,000,000	APBD II (DAU)		41	30,000,000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan pada Daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2023, dan prakiraan maju tahun 2024 pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1

Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1-6	0-0	0-0	01		DINAS SOSIAL			5.255.549.589						4.117.199.589
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3.184.549.589						2.817.199.589
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.184.549.589				PP	100	2.817.199.589
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	38,46						40,56	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)	11	100.000.000				KP	11	100.000.000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	25.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	25.000.000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	15.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	3	45.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			3	45.000.000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)</i>	4	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			4	15.000.000
x	xx	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b><i>Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)</i></b>	3	1.985.249.589				KP	3	1.985.249.589
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN (orang/bulan))</i>	26	1.920.249.589	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			26	1.920.249.589
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dokumen)</i>	1	45.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	45.000.000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)</i>	2	20.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	20.000.000
x	xx	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b><i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(dokumen)</i></b>	6	30.000.000				KP	6	25.000.000

x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD (laporan)	6	30.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			6	25.000.000
---	----	----	------	----	---	---	---	------------	---------------	------------------	--	--	---	------------

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)	4	130.000.000				KP	4	90.000.000
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	10.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	20.000.000
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	10.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	20.000.000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	7	70.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	20.000.000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	5	40.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	30.000.000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	201.500.000				KP	100	179.500.000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	2.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			2	2.000.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	5	28.500.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			4	21.000.000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang	5	10.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			5	10.000.000

						<i>Disediakan (paket)</i>								
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)</i>	1	50.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	30.000.000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)</i>	1	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.000.000



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	1.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	1.000.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	35.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	35.000.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	60.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	65.500.000
x	xx	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)</b>	<b>19</b>	<b>325.000.000</b>					<b>19</b>	<b>25.000.000</b>
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	35.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	13	125.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.000.000
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1	10.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	10.000.000

x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	1	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD I (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	75.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	4	45.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	20.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>287.800.000</b>					<b>100</b>	<b>287.450.000</b>
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	2.000.000	OPD/Larantuka	APBD I (DAU)			12	1.650.000

KOD E					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	65.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	65.000.000

						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)								
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	220.800.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			12	220.800.000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	125.000.000					100	125.000.000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11	50.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			11	50.000.000
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1	15.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	15.000.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	30.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			1	30.000.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	48	30.000.000	OPD/Larantuka	APBD II (DAU)			48	30.000.000
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			2.071.000.000						1.300.000.000
1	0	0			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase	36	475.000.00			PN-	PU-	-	180.000.00

	6	2				pemberdayaan KAT (%)		0			3	2		0
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	13						26	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase pemberdayaan KAT (%)	37%	125.000.000			KP-3	KU-2	-	-
													-	-
KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	44	75.000.000	Ds. Lewotamah Ole & DsLamaole Kec Solor Barat,Ds. Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga, Ds. Lamanabi Kec Tanjung Bunga, Ds.Riang Padu Kec Adonara Barat.				106	-
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	44	50.000.000	Kec Tanjung Bunga (Desa Aransina, Lamatutu, Laton Liwo II), Solor Timur (Desa Tanahwerang)				-	-

						(Keluarga)									
1	06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kesejahteraansosial daerah (%)	13	350.000.000	Larantuka				25,9	180.000.000
1	06	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan PotensiPekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	50	75.000.000	Tersebar di 19 Kecamatanamata n				50	50.000.000
1	06	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan PotensiTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga)	19 TKSK	75.000.000	Tersebar di 19 Kecamatanamata n				19 TKSK	50.000.000
	06	02	2.03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga)	50	75.000.000	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa), Kecamatan Larantuka (18 Desa/Kel), Kec Witihama (Desa Balaweling Notan, Sandosi,Lewopulo, Tuagoetobi, Weranggere, Oringbele, Balawelin), Kec Ile Mandiri (Desa Lewoloba, Tiwatobi, Halakodanuan, Watotutu,Lewohala), Kec Lewolema (Desa				50	50.000.000

KOD E					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SU B KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITA S		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBE R DANA	P N	P D	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Bantala Riangkotek,Kecamatan Ile Boleng (21 Desa), Kecamatan Larantuka (18 Desa/Kel), Kec Witihama (Desa Balaweling Notan, Sandosi,Lewopulo, Tuagoetobi, Weranggere, Oringbele, Balawelin), Kec Ile Mandiri (Desa Lewoloba, Tiwatobi, Halakodanuan, Watotutu,Lewohala), Kec Lewolema (Desa Bantala Riangkotek, Painapang, Balukherin, IlePadung, Sinar Hading), Kec. Ile Bura (7 Desa), Kec. Demong Pagong (DesaBlepanawa), Kec. Adonara Timur (DesaTuawolo),					

									Kec.Tanjung Bunga (Desa Kolaka, Lewobunga, Gekengderan, Aransina, Patisirawalang, Latonliwo, Ratulodong, Sinar Hadigala,Waibao, Bandon, Bahinga), Kec.Titehena (Desa Lewoingu, Kobasoma), Kec. Wulanggitang (DesaPululera, Hokeng Jaya, Boru), Kec. Solor Barat,Solor Timur dan Solor Selatan.					
KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2	75.000.000	Solo (Jawa Tengah), Larantuka, Adonara Barat,Kec Kelubagolit (12 Desa),Kec Witiham (Desa Tuwagoetobi) Kec Adonara Timur (Desa Lewo Bunga, Lelenbala,Bilal), Kec. Ile Boleng (Desa Lamawolo) Kec Demon Pagong (DesaKawalelo, Lamika, Lewomuda, Lewokluok) Kec Ile Mandiri (Desa RiangKemie, Tiwatobi, Muda Keputu, Watotutu, Halakodanuan, Lewohala),Kec				1	30.000.000

									Lewolema (Desa Painapang), Kec Tj Bunga(Desa Ratu Lodong, Lamatutu),					
									Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Solor Timur (Desa Menanga, Watobuku), Wulanggitang(Desa Boru).					



KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Sertifikat)	6	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				-	-
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75.000.000				PP	100	50.000.000
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal			75.000.000				KP		50.000.000
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)	5	75.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				5	50.000.000
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	53,06	556.000.000	Larantuka				60,06	550.000.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut		10%	305.000.000	Larantuka				10,95%	294.000.000

					Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti									
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	25	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				25	50.000.000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersediadalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	25	25.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				25	25.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATI F(Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan AlatBantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	15	50.000.000	Kec Titehena (Desa Watowara, Leraboleng, Konga, Lewoingu), Kec Ile Bura (Desa Birawan), Kec Larantuka (Kel. Balela, Ekasapta, Amagarapati, Pohon Sirih),  Kec Ile Mandiri (Desa Wailolong) Kec. Lewolema (Desa Riangkotek, Bantala) Kec.Adonara Tengah (Desa Wewit, Horowura) Kec. Adonara Timur (Tapobali, Terong, Saosina, Lamahala Jaya), Kec.Solor Barat (Desa Balaweling 1, Ritaebang) Kec. Adonara Barat (Desa Danibao), Kec. Wotan Ulumado (Desa Oyangbaran), Kec. Witihama (Pledo), Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadike, Duablolong, Nelelamawangi 2), Kec. Adonara (Desa Kolimasan), Kec. Solor Selatan (Desa Sulengwaseng), Kec. Tanjung Bunga (Desa Ratulodong), Kec. Wulanggitang (Desa Boru),				15	50.000.000

1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	25	25.000.000	Tersebar di 250 Desa/Kelurahan				25	24.000.000
---	----	----	------	----	---	---	----	------------	--------------------------------	--	--	--	----	------------

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	25	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				25	40.000.000
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	20	25.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				20	25.000.000
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	5	20.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				5	20.000.000
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	5	20.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				5	20.000.000
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan</i>	5	20.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				5	20.000.000

						Kabupaten/Kota (orang)								
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	5	20.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				5	20.000.000
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		21%	251.000.000				KP	27,11%	256.000.000
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	10	25.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			10	30.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	10	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			10	50.000.000
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersediadalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	10	30.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			10	30.000.000
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan AlatBantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	10	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			10	50.000.000
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan diLuar Panti	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupa ten/Kota (orang)</i>	10	21.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			10	21.000.000
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	10	25.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			10	25.000.000
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	<i>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan</i>	10	25.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			10	25.000.000

						NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)								
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	5	25.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			5	25.000.000
1	06	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	13,36	580.000.000			PN- 3	PU- 2	16,33	240.000.000
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan(%)	100						100	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar		13,36	180.000.000	Larantuka		KP-3	KU-2	16,33	90.000.000
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	5	60.000.000	Tersebar di 250 Desa/Kelurahan	APBD II (DAU)			4	30.000.000
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	5	60.000.000	Tersebar di 250 Desa/Kelurahan	APBD II (DAU)			4	30.000.000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	5	60.000.000	Tersebar di 250 Desa/Kelurahan	APBD II (DAU)			4	30.000.000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		100	400.000.000	Larantuka		KP-3	KU-2	100	150.000.000

1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)</i>	129.904	100.000.000	Kec. Ile Bura (Desa Birawan, Riangbura, Lewoawang, Nobo Konga), Kec. Wotan Ulumado (Desa Demondei, Pandai, Oyangbaran), Kec. Adonara Tengah (Desa Lewopao, Nubalema, Oe Sayang, Desa Wewit), Kec. Lewolema (Desa Balukherin, Bantala), Kec. Solor Barat (Desa Daniwato), Kec. Titehena (Desa Tenawahang, Dulijaya), Kec. Ado Timur (Desa Dawataa, Puhu, Lelenbala, Tapobali, Lamahala Jaya) Kec. Larantuka (Lewolere, Balela) Kec. Wulanggitang (Desa Waiula, Nawakote, Pantai Oa, Hokeng Jaya, Nileknohing, Hewa, Boru, Boru Kedang),	APBD II (DAU)			129.904	50.000.000
---	----	----	------	----	---	--	---------	-------------	---	------------------	--	--	---------	------------

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Kec Ile Boleng (Desa Riawale, Nelebelolong, Nelelamawangi 2), Kec TjBunga (Desa Bandona, Lamanabi, Nusanipa, Latonliwo 2), Kec. Solor Timur (Desa Menanga)  Kec. Solor Selatan (Desa Lewogaran, Kenere, Sulengwaseng, Kaliike Aimatean), Kec. Demon Pagong (Desa Blepanawa),Kec. Ile Mandiri (Desa Riangkemie)					
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota (keluarga)</i>	12.823	100.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				12.823 (Program Sembako)	50.000.000
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga)</i>	32.476	200.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan				129,904	50.000.000

1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	360.000.000				PP	100	280.000.000
						Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	1,2						1,2	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			270.000.000				KP	100	210.000.000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	50	75.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			50	50.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	50	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			50	40.000.000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	3	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			3	40.000.000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)	25	50.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			25	40.000.000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	25	45.000.000	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	APBD II (DAU)			25	40.000.000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100	90.000.000	Larantuka			KP	100	70.000.000

1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)</i>	3	50.000.000	Ds Duablolong, Ds Pledo, Ds. Oyangbarang, Ds Kolaka, Ds Lamatutu, Ds. Ilepadung, Ds. Adabang, Ds. Sinarhading, Ds. Lewobele, Ds. Nurabelen, Ds. Waitukan, Ds. Kalike Aimatean, Desa Menanga	APBD II (DAU)			3	40.000.000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)</i>	41	40.000.000	Tersebar di 19 Kecamatanamatan	APBD II (DAU)			41	30.000.000
1	06	07			<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b><i>Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola (%)</i></b>	100	25.000.000	Larantuka			PP		-
1	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		100	25.000.000	Larantuka			KP	-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman MakamPahlawan Kabupaten/Kota (makam)</i>	1 Makam	25.000.000	TMP. Lapak Tana - Larantuka	APBD II (DAU)			-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang social disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

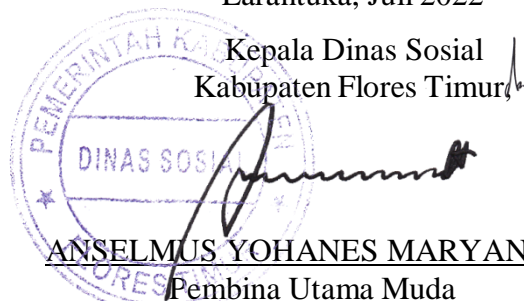
Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan terutama dalam urusan sosial.
2. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.
3. Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2023 akan berjalan efektif jika terdapat komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkannya dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Tahun 2023.

Larantuka, Juli 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Flores Timur

  
ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670420 199703 1 008